

Semua Institusi Negara Harus Bersin

Hadapi Pemilu dan Pilkada Serentak

JOGJA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Anwar Usman mengatakan, pemilu dan pilkada serentak yang diputuskan MK diharapkan bisa

menjadi pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, negara Indonesia masih mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Indonesia.

"Pemilu serentak untuk memperkuat sistem presidensial, sesuai amanat UUD 1945," kata Anwar pada seminar di UMY, kemarin (20/10). Alasan lain pemilu serentak adalah

untuk efisiensi uang negara dalam menyelenggarakan pemilu. Penghematan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta menghindari adanya konflik di tengah masyarakat yang dipicu pemilu. "Saat memutuskan pemilu serentak, hakim MK berdiskusi panjang secara sistematis dan dramatis untuk demokrasi

Indonesia yang lebih baik," paper Anwar. Anwar minta, semua masyarakat menerima keputusan MK tersebut. Perimbangan demokrasi harus dimaknai secara positif oleh seluruh elemen masyarakat. Harapannya, pemilu serentak nanti mendapatkan pemimpin yang profesional sesuai harapan masyarakat. "Semua instansi negara harus bersinergi seperti KPU, Bawaslu, DKPP,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan MK untuk menyelesaikan penyelenggaraan pemilu, demi terjaganya kedaulatan rakyat," pinta Anwar.

Wakil Dekan Fakultas Hukum UMY Mukhtar Zuhdy mengatakan, pemilu serentak menjadi momentum bagi para politisi membuktikan, Indonesia mampu membangun demokrasi yang lebih baik dengan caranya sendiri.

Demokrasi lewat bisa mendorong dosen untuk ilmu yang bersinergi. "Proses demokrasi sesuai harapan ada politik yang mewujudkan dan akuntabels Mukhtar. (mar/